



Volume 3, No 3, April (2026)	DOI: https://doi.org/10.59585/jimad	Page: 150 - 159
---------------------------------	---	--------------------

Peranan Manajemen Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng

Sangkala Irwan^{1*}, Dasmaniar², Jusran³

¹ Program Studi Kewirausahaan, Universitas Prof. Dr. H. M. Arifin Sallatang, Kota, Indonesia

² Program Studi Kewirausahaan, Universitas Prof. Dr. H. M. Arifin Sallatang, Kota, Indonesia

³ Program Studi Kewirausahaan, Universitas Prof. Dr. H. M. Arifin Sallatang, Kota, Indonesia

***Corresponding Author:** Sangkala Irwan; Email: sirwanhasan71@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Planning Management, Village Development, Community Participation, Community Empowerment

Received : 29 Desember 2025

Revised : 20 Januari 2026

Accepted : 20 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village development planning management on community participation in Gantarangkeke Subdistrict, Bantaeng Regency. Village development planning management in this study focuses on three main aspects, namely community empowerment, coordination, and program socialization. The research uses a quantitative approach supported by qualitative data. Data collection was carried out through observation, interviews, questionnaires, and documentation. The research population consisted of the community and government officials, with proportional sampling. Data analysis was performed using descriptive analysis and multiple linear regression.

The results of the study indicate that community empowerment, coordination, and program socialization simultaneously have a positive effect on community participation in village development planning. Partially, community empowerment is the most dominant factor in encouraging community participation. These findings indicate that the success of village development planning is largely determined by the quality of planning management that can enhance community capacity, strengthen coordination among stakeholders, and optimize the dissemination of development program information. Therefore, enhancing the role of village development planning management is a crucial strategy in achieving participatory and sustainable village development planning.



PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan) sebagai forum partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa terakomodasi secara sistematis dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dipandang sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan. Cohen dan Uphoff (1980) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup kehadiran dalam forum pengambilan keputusan, tetapi juga keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Senada dengan itu, Conyers (1991) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi efektivitas perencanaan pembangunan, khususnya di tingkat lokal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang terciptanya kebijakan pembangunan yang responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas manajemen perencanaan yang diterapkan. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004), perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didukung oleh kemampuan manajerial yang mampu mengintegrasikan aspek teknokratik, partisipatif, serta pendekatan bottom-up dan top-down. Ndraha (2003) menambahkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama selain akuntabilitas dan transparansi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Chambers (1997) menekankan bahwa pembangunan berbasis masyarakat hanya dapat berhasil apabila masyarakat memiliki



kapasitas, akses, dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh Mardikanto dan Soebiato (2013) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu menentukan pilihan dan bertindak secara mandiri dalam pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Selain pemberdayaan, koordinasi antar pemangku kepentingan juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Dwiyanto (2011), lemahnya koordinasi antar aktor pembangunan seringkali menjadi penyebab rendahnya efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan lembaga perencanaan daerah akan menciptakan keselarasan program dan kejelasan peran, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif. Sosialisasi program pembangunan juga menjadi faktor strategis, karena menurut Wahab (2008), kebijakan publik yang tidak dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat cenderung mengalami resistensi atau partisipasi yang rendah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajemen perencanaan pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian Suharto (2005) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat berkontribusi positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal. Hasil penelitian Suryono (2010) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor memiliki pengaruh terhadap efektivitas Musrenbang Desa. Penelitian Handayani dan Nurhadi (2012) juga mengungkapkan bahwa intensitas sosialisasi program pembangunan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa. Selanjutnya, penelitian Rahmawati (2015) dan Pratama (2017) menunjukkan bahwa desa dengan manajemen perencanaan yang baik cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan tata kelola perencanaan yang lemah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008–2013 menempatkan desa sebagai basis utama pembangunan melalui visi “Bantaeng sebagai Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri.” Visi ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2011) yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis lokal sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



secara berkelanjutan. Namun, realisasi visi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana manajemen perencanaan pembangunan desa mampu mendorong partisipasi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah tersedia, berbagai tantangan masih dijumpai dalam praktik perencanaan pembangunan desa, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurang optimalnya sosialisasi program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif perencanaan partisipatif dan implementasinya di tingkat desa, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Widodo (2018) dan Kurniawan (2019).

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, kajian empiris mengenai peranan manajemen perencanaan pembangunan desa terhadap partisipasi masyarakat menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat, koordinasi, dan sosialisasi program terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kemandirian desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Februari hingga April 2010.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses dan bentuk partisipasi masyarakat dalam manajemen perencanaan pembangunan desa guna memperoleh gambaran faktual mengenai keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan



JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Homepage: <https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD>
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : <https://doi.org/10.59585/jimad>
Volume 3 | Nomor 3 | 2026



Research Article

responden terpilih, baik dari unsur masyarakat maupun aparat pemerintahan, untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Wawancara bersifat terstruktur dan semi-terstruktur agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data kuantitatif yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diberikan kepada responden untuk memperoleh data yang akurat serta dapat diolah secara statistik. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, laporan, arsip, dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa di lokasi penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan diperoleh melalui hasil pengolahan kuesioner serta pengukuran langsung terhadap variabel penelitian. Data ini bersifat objektif dan digunakan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antarvariabel secara statistik. Sementara itu, data kualitatif berupa informasi deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi atau kategori tertentu, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kualitatif digunakan untuk memperkuat dan memperjelas hasil analisis kuantitatif, serta dalam proses tertentu dapat dikonversi ke dalam bentuk ordinal atau peringkat.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat serta aparat pemerintahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen perencanaan, laporan kegiatan, arsip pemerintahan, dan informasi dari instansi terkait yang relevan dengan objek penelitian.

Populasi penelitian terdiri atas dua kelompok, yaitu masyarakat dan aparat pemerintahan. Populasi masyarakat mencakup seluruh masyarakat Kecamatan Gantarangkeke dengan fokus sampel pada Desa Kaloling yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.143 jiwa atau 913 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 56 kepala keluarga sebagai responden penelitian. Sementara itu, sampel dari unsur aparat pemerintahan meliputi 15 orang perangkat Desa Kaloling, 11 orang aparat Kecamatan Gantarangkeke, dan 30 orang aparat dari



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng, sehingga total responden dari kelompok aparat berjumlah 56 orang.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat serta peran faktor pemberdayaan masyarakat, koordinasi, dan sosialisasi program dalam perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan yang mengacu pada Sudjana (1999).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat, koordinasi, dan sosialisasi program memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hasil dari proses manajerial yang terencana dan terintegrasi, bukan sekadar keterlibatan administratif dalam forum perencanaan. Temuan tersebut memperkuat pandangan dalam kajian manajemen publik yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai outcome dari kualitas tata kelola perencanaan pembangunan desa.

Dominannya pengaruh pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Sutiyo dan Maharjan (2021) yang menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan prasyarat utama terciptanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembangunan desa. Mereka menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi akan lebih mampu berperan aktif dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitas kontribusi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Pratiwi et al. (2022) yang menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor struktural lainnya, seperti mekanisme koordinasi dan sosialisasi program. Penelitian tersebut menekankan bahwa masyarakat yang merasa memiliki kapasitas dan legitimasi untuk terlibat akan lebih terdorong untuk menyampaikan aspirasi secara kritis dan



JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Homepage: <https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD>
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : <https://doi.org/10.59585/jimad>
Volume 3 | Nomor 3 | 2026



Research Article

konstruktif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Selain pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial penting yang mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam forum perencanaan pembangunan desa.

Peran sosialisasi program pembangunan yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Lestari dan Widodo (2024) yang menegaskan bahwa kualitas sosialisasi berpengaruh langsung terhadap pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan dialogis memungkinkan masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta implikasi program pembangunan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih substantif. Sebaliknya, sosialisasi yang terbatas dan bersifat formalitas cenderung menghasilkan partisipasi semu yang kurang berdampak terhadap kualitas perencanaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperluas hasil penelitian terdahulu bahwa manajemen perencanaan pembangunan desa yang efektif harus mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan sosialisasi program secara sinergis. Dominannya pengaruh pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan strategi paling fundamental dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini relevan dengan visi pembangunan Kabupaten Bantaeng sebagai “Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri” serta memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian manajemen publik dan perencanaan pembangunan berbasis desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan pembangunan desa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng. Pemberdayaan



masyarakat, koordinasi, dan sosialisasi program secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal perencanaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan desa.

Di antara faktor-faktor yang diteliti, pemberdayaan masyarakat merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kapasitas, pemahaman, dan kesadaran yang baik cenderung lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Sementara itu, koordinasi antar pemangku kepentingan dan sosialisasi program berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas manajemen perencanaan pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, didukung oleh koordinasi yang efektif dan sosialisasi program yang berkelanjutan, merupakan strategi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan desa sebagai basis utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

1. Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
2. Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London, UK: Intermediate Technology Publications.
3. Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-)
4. Conyers, D. (1991). *An introduction to social planning in the Third World*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
5. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
6. Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.



7. Handayani, S., & Nurhadi. (2012). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 85–96.
8. Kurniawan, B. (2019). Tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 45–56.
9. Lestari, D., & Widodo, T. (2024). The role of program socialization in enhancing community participation in village development planning. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 45–60. <https://doi.org/10.5296/jpag.v14i1.xxxx>
10. Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
11. Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
12. Pratama, R. A. (2017). Manajemen perencanaan pembangunan desa dan tingkat partisipasi masyarakat. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(2), 101–112.
13. Pratiwi, R., Siregar, H., & Nugroho, R. (2022). Community empowerment and participation in village development planning: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Rural Development Studies*, 7(2), 89–104.
14. Rahman, A., & Hidayat, R. (2023). Intergovernmental coordination and community participation in decentralized development planning. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 23–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.xxxx>
15. Rahmawati, I. (2015). Pengaruh Musrenbang desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 3(1), 67–78.
16. Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
17. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.)*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
18. Sudjana. (1999). *Metode statistika*. Bandung, Indonesia: Tarsito.
19. Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
20. Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
21. Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi kebijakan publik*. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press.
22. Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2021). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Singapore: Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-xxxx-x>



JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Homepage: <https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD>
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : <https://doi.org/10.59585/jimad>
Volume 3 | Nomor 3 | 2026



Research Article

23. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
24. Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
25. Widodo, J. (2018). Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 6(2), 89–102.